



This is an open access article under
CC-BY-SA license

* Corresponding Author

PARTISIPASI MASYARAKAT PERBATASAN DALAM PEMBANGUNAN POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) JAGOI BABANG

Antonia Sasap Abao¹, Zakiah Hasan Gaffar²

¹Universitas Tanjungpura, Indonesia

Email: antonia.sasap.abao@fisip.untan.ac.id, zakiah.hasan.gaffar@fisip.untan.ac.id*

Abstract. *This paper discusses the response and readiness of the community to the development of the Jagoi Babang PLBN and analyzes the forms of participation of the Jagoi Babang border community in the stages of the development process and utilization of the Jagoi Babang PLBN. Data and information in this study were collected using in-depth interviews, Focus Group Discussions and non-participant observation. Furthermore, the data was processed in a qualitative descriptive method. The results showed that the Jagoi Babang border community generally responded positively to the development of the PLBN because it was felt very helpful for them in carrying out cross-border activities safely and comfortably. The community also hopes that developing the PLBN will help the community improve the economic level and open up new job opportunities, especially for local youth who have successfully received higher education outside Jagoi-Babang. Another important finding is that the Jagoi Babang border community has participated and is currently participating in the planning process and the implementation phase of the physical development of the PLBN in a very limited scope. Workers outside the Jagoi area still dominate most construction work. Community involvement is still focused on the low-skill work sector as manual labour, such as stone transporters, cement casters, construction workers, cleaners/ sweepers and security guards. Furthermore, in the plan to utilize the PLBN, the Immigration and Customs Office will actively involve residents as workers, either as administrative employees or as unskilled labourers or other non-skilled workers. In addition, residents will also be provided with facilities for trading by utilizing market buildings/shops/kiosks built around the PLBN to sell various garden/agricultural products and handicrafts.*

Keywords: Participation; Society; Border; PLBN; Jagoi Babang

Abstrak. Kertas kerja ini membahas tentang tanggapan dan kesiapan masyarakat terhadap pembangunan PLBN serta menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat perbatasan Jagoi Babang dalam tahapan proses pembangunan dan pemanfaatan PLBN Jagoi Babang. Data dan informasi dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* dan observasi non-partisipan. Selanjutnya data diolah secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat perbatasan Jagoi Babang merespon positif pembangunan PLBN karena dirasakan sangat membantu masyarakat perbatasan dalam melakukan kegiatan lintas batas negara dengan aman dan nyaman. Masyarakat juga berharap agar pembangunan PLBN bukan hanya dapat membantu masyarakat memperbaiki tingkat perekonomian, namun juga membuka lapangan pekerjaan baru, khususnya bagi para pemuda setempat yang telah berhasil mengenyam pendidikan tinggi di luar Jagoi-Babang. Temuan penting lainnya yaitu masyarakat perbatasan Jagoi Babang telah dan sedang berpartisipasi dalam proses perencanaan dan tahap pelaksanaan pembangunan fisik PLBN di lingkup yang sangat terbatas. Sebagian besar pekerjaan pembangunan, masih didominasi oleh tenaga kerja dari luar daerah Jagoi. Ranah keterlibatan masyarakat masih terfokus pada sektor pekerjaan yang rendah skill sebagai pekerja kasar seperti pengangkut batu, pengecor semen, tukang bangunan, tukang bersih/ tukang sapu dan satpam (*security*). Selanjutnya dalam rencana pemanfaatan PLBN, pihak Imigrasi dan Bea Cukai akan mengikutsertakan penduduk lokal secara aktif sebagai tenaga kerja baik sebagai pegawai administrasi mau pun sebagai buruh kasar atau pekerja *non-skilled* lainnya. Selain itu, penduduk setempat juga akan disediakan fasilitas untuk berdagang dengan memanfaatkan bangunan pasar/ruko/kiosk yang di bangun di sekitar PLBN untuk berjualan berbagai hasil kebun/pertanian dan hasil karya kerajinan.

Kata kunci: Partisipasi; Masyarakat, perbatasan; PLBN; Jagoi Babang



PENDAHULUAN

Berdasarkan berbagai referensi yang ada bahwa Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Secara geografis Provinsi Kalimantan Barat memang memiliki lima kabupaten yang berbatasan daratan langsung dengan wilayah Sarawak, Malaysia Timur, diantaranya yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas. Dari lima kabupaten tersebut, sampai saat ini yang telah memiliki PLBN (Pos Lintas Batas Negara) ada tiga kabupaten yaitu PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Badau di Kabupaten Kapuas Hulu dan PLBN Aruk, di Kabupaten Sambas. Sementara masih ada dua titik perbatasan yang belum memiliki PLBN yaitu perbatasan Jagoi Babang yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Bengkayang dan perbatasan di Kabupaten Sintang.

Pembangunan PLBN menjadi salah satu program pemerintah yang sangat *urgent* dan prioritas guna mengurangi dan mencegah maraknya berbagai persoalan sosial, ekonomi dan hukum yang sering terjadi di sepanjang jalur perbatasan terutama pada jalur perbatasan tradisional. Jalur tradisional merupakan jalan setapak yang dibuat oleh penduduk setempat untuk melakukan berbagai kegiatan lintas batas seperti berjualan hasil pertanian/perkebunan dan untuk mengunjungi kerabat yang tinggal di wilayah Malaysia. Namun seiring berjalannya waktu, jalur-jalur tersebut seringkali dimanfaatkan oleh orang luar atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai jalur transaksi illegal seperti perdagangan barang dan manusia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sindonews (2020), bahwa BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan) menyebutkan setidaknya terdapat sekitar 29 titik lintas batas tidak resmi di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia terutama di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Sebaran titik lintas batas tidak resmi di Kabupaten Sambas berada pada Kecamatan Paloh (Desa Temajuk 2 titik) dan Kecamatan Sajingan Besar (Desa Sei Bening 1 titik dan Desa Sebunga 2 titik). Sedangkan di Kabupaten Bengkayang berada pada Kecamatan Jagoi Babang (Desa Pareh 2 titik, dan Desa Semunying 7 titik, Desa Semunying Jaya 1 titik, Desa Sekida 4 titik, Desa Jagoi Babang 6 titik, dan Desa Siding 4 titik). Data tersebut menjelaskan bahwa di daerah perbatasan Jagoi Babang masih memiliki titik lintas batas secara illegal sebanyak 24 titik. Hal ini jelas menggambarkan bahwa perbatasan Jagoi Babang sangat berpotensi dan memberi ruang bagi pelaku kejahatan lintas batas melakukan transaksi barang-

barang terlarang mau pun aktifitas illegal lainnya. Dengan kata lain, banyaknya jalan tikus /pintas illegal turut menyuburkan praktek kejahatan transnasional di kedua perbatasan negara (Indonesia-Malaysia).

Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan terjadi peningkatan kasus pidana di jalur perbatasan Kalimantan Barat, termasuk perbatasan Jagoi Babang dengan Sarawak, disebabkan oleh beberapa faktor. Sebagai contoh, Gaffar, (2012); Gabriela, (2019); Niko, (2017) mengungkapkan bahwa adanya akses geografis yang strategis yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia menjadikan kawasan perbatasan di Kalimantan Barat menjadi daerah yang tidak aman dan menjadi faktor pendukung penyebaran narkoba, beredarnya obat-obatan terlarang.

Salah satu bentuk kegiatan ilegal yang sering terjadi di perbatasan Jagoi Babang, Serikin dengan Sarawak, Malaysia Timur adalah peredaran narkoba. Pada tahun 2016 misalnya disita sekitar 40 kg obat terlarang. Sedangkan pada tahun 2017 terdapat 20 kg narkoba yang diimpor dari Sarawak Malaysia ke Jagoi Babang, Indonesia (Suarapemredkalbar, 2017).

Selanjutnya pada tahun 2018 tertangkap WN Malaysia yang memasukkan narkoba ke wilayah Indonesia berupa sabu sekitar 13 gram (AntaraneWS, 2018). Temuan menarik lainnya, di tahun 2019 adalah ditemukannya seorang pemuda asal Jagoi Babang membawa 0,6 gram sabu kristal asal Serikin, Sarawak, Malaysia (RRI, 2019).

Selain itu, menurut Suara Pemred (2019) barang yang telah disita oleh pihak berwenang sebagai barang bukti berupa 1.024.193 bungkus kosmetik dan obat-obatan, 4.350 bungkus bahan makanan, 774.036 suku cadang kendaraan, dan 48.641 barang elektronik. Selanjutnya pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19, jumlah kasus peredaran narkotika meningkat lebih cepat dari tahun sebelumnya (Abao, AS, 2020).

Adanya berbagai persoalan sosial dan hukum beserta bukti-bukti kongkritnya yang berpotensi mengancam ketahanan negara, maka percepatan pembangunan PLBN di jalur perbatasan Jagoi Babang dirasa sangat penting dan menjadi sangat *urgent* sebagai upaya penciptaan stabilitas nasional. Atas dasar itulah, pemerintah mendukung upaya pembentukan PLBN di perbatasan Jagoi Babang yang dibuktikan dengan dikeluarkannya instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan 11 Pos Lintas batas Negara Terpadu dan sarana-prasarana penunjang di kawasan perbatasan. Instruksi presiden tersebut sekaligus menjadi landasan hukum pelaksanaan pembangunan PLBN di Jagoi Babang.

Pembangunan PLBN Terpadu Jagoi Babang yang terletak di Kabupaten Bengkayang tersebut

telah mulai dikerjakan pada awal tahun 2021 dengan target penyelesaiannya diperkirakan pertengahan tahun 2022 mendatang. Pengembangan PLBN mengusung konsep *Green Building* yang artinya berorientasi pada pembangunan ramah lingkungan. Keseriusan pemerintah dalam hal ini terlihat jelas pada saat acara penandatanganan kontrak Pengembangan PLBN Terpadu Jagoi Babang yaitu pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 yang dilaksanakan dilaksanakan secara *hybrid virtual* di Kantor Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Barat (Cipta Karya, 2020).

Langkah aksi nyata selanjutnya yaitu dilakukannya pertemuan awal pembahasan pelaksanaan pembangunan PLBN pada tanggal 18 Desember 2020 di Aula Bupati II Lantai V Kantor Bupati Bengkayang. Pada pertemuan perdana para *stakeholders* saat itu, Pejabat Bupati Bengkayang Bapak Yohanes Budiman menyampaikan bahwa pembangunan PLBN wajib memperhatikan kelestarian kearifan lokal masyarakat karena sebagian lahan masyarakat menjadi bagian dari lokasi pembangunan PLBN. Selain itu, dalam proses pengerjaan proyek pembangunan sarana dan prasarana PLBN haruslah melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal (penduduk Jagoi Babang dan sekitarnya) sebagai tenaga kerja menurut *skill* dan kemampuan yang dimilikinya (Antonius, 2020).

Pernyataan Pejabat Bupati Bengkayang tersebut menjelaskan bahwa pelibatan masyarakat lokal (perbatasan) menjadi penting diperhatikan karena masyarakat merupakan salah satu komponen pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh dan kontribusi dalam kesuksesan pembangunan PLBN Jagoi Babang. Hal senada juga dipertegas oleh Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang, Syamsul Rizal pada bulan Maret 2021, bahwa masyarakat merupakan bagian yang perlu diikutsertakan dalam proses pembangunan PLBN tersebut (Siberindo, 2021). Jadi dapat disimpulkan bahwa salah satu kunci kesuksesan proyek pembangunan PLBN Jagoi Babang adalah pelibatan masyarakat setempat dalam setiap proses atau tahapan pelaksanaan pembangunannya.

Sayangnya, keterangan dari aparat desa terdapat penduduk perbatasan Jagoi Babang yang tidak dilibatkan dalam proses pembangunan fisik PLBN padahal mereka menganggur akibat pandemi Covid-19. Meskipun demikian ada juga sebagian dari penduduk lokal yang berpartisipasi dalam pembangunan PLBN. Namun, jumlahnya masih dianggap belum merepresentasikan keinginan masyarakat secara umum. Atas dasar itulah tim peneliti kali ini menjadi termotivasi untuk

mengetahui secara lebih detail terkait fakta pelibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana PLBN Jagoi Babang.

METODE

Proses pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama, tim peneliti melakukan koordinasi dengan kepala desa Jagoi Babang untuk meminta izin melakukan penelitian terkait. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan survei lapangan. Tahap kedua, tim peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan dengan tiga metode yaitu FGD, wawancara mendalam, dan observasi non-partisipan.

Data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada model analisis Miles dan Huberman. Artinya, analisa data oleh tim peneliti dilakukan secara terus-menerus sesuai data empiris yang ditemukan di lapangan sampai data dirasakan sudah mengalami kejenuhan, (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2010).

HASIL DAN DISKUSI

Tanggapan dan kesiapan masyarakat terhadap pembangunan PLBN Jagoi Babang

Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki beberapa daerah kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Terdapat lima kabupaten, diantaranya Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kecamatan Jagoi-Babang yang berada di Kabupaten Bengkayang adalah salah satu wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, daerah perbatasan adalah daerah terluar yang merupakan kawasan strategis nasional yang mempunyai peran penting dalam pertahanan suatu negara, batas wilayah NKRI dan daerah batas wilayah negara tetangga yang disepakati bersama berdasarkan perjanjian lintas batas (*cross-border agreement*) antara Pemerintah Republik Indonesia dan negara tetangga, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Daerah perbatasan merupakan wilayah terluar yang kawasannya secara geografis berbatasan langsung dengan negara asing dan langsung berhadapan dengan negara tetangga. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang penataan ruang “Daerah perbatasan merupakan kawasan strategis yang dapat dilihat dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan”.

Aylin (2015) menyatakan bahwa daerah perbatasan merupakan wilayah yang kawasannya secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan langsung berhadapan dengan negara lain. Wilayah yang dimaksud adalah bagian wilayah provinsi, kabupaten atau kota yang langsung bersinggungan dengan garis batas negara (atau wilayah negara tetangga). Dalam rencana induk pengelolaan perbatasan negara (Bappenas) perbatasan didefinisikan sebagai wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain dan batas-batas wilayah hanya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Wilayah perbatasan seringkali, karena posisi geografisnya, menjadi daerah yang terpencil dan terisolir dari perhatian pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Meskipun perbatasan adalah juga merupakan garda terdepan wilayah pertahanan negara Indonesia, namun kerap kali dia mengalami ketertinggalan di berbagai aspek pelayanan publik, infrastruktur, dan pembangunan secara keseluruhan. Selain itu masyarakat di daerah perbatasan juga dihadapkan pada permasalahan yang multi-kompleks seperti masalah ekonomi, sosial budaya, politik, ideologi, infrastruktur, dan keamanan. Selama puluhan tahun, wajah wilayah perbatasan tidak mengalami perubahan yang berarti. Baru sekitar kurang lebih 8 tahun terakhir ini, di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia, mulai berbenah diri dan mengejar ketertinggalannya dengan daerah-daerah yang berada dekat dengan pusat pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Tentu saja langkah pembangunan ini masih sangat jauh dari sempurna. Daerah perbatasan sampai hari ini, masih harus bergelut dengan berbagai permasalahan yang mendasar dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah, khususnya dalam aspek infrastruktur dan pelayanan publik. Di sinilah kinerja pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk bersinergi dalam penyediaan pelayanan umum dan pembangunan sosial ekonomi seperti, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan pendapatan, kemanan, perlindungan hukum dan penguatan daya beli masyarakat. Inilah alasan penting mengapa pemerintah pusat dan daerah harus memberikan perhatian khusus kepada daerah perbatasan.

Prud'homme (2005) menyatakan bahwa infrastruktur memainkan peranan penting dalam pengembangan kawasan perbatasan. Keberadaan infrastruktur menyediakan konektivitas dan aksesibilitas yang merupakan bagian signifikan dalam pembangunan daerah perbatasan. Kehadiran

infrastruktur yang memadai dapat menunjang berbagai bentuk aktifitas masyarakat dan aparat pemerintahan, sekaligus membantu mengembangkan aktifitas dan hubungan lintas batas dan lintas negara.

Dasawarsa terakhir ini, telah terjadi peningkatan kesadaran warga masyarakat, khususnya mereka yang berada di daerah perbatasan, tentang pentingnya penataan dan optimalisasi potensi wilayah perbatasan. Masyarakat di wilayah perbatasan, tidak lagi puas dengan pembangunan dan pendekatan ala kadarnya yang selama ini ditunjukkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kemajuan teknologi informasi ditambah dengan semakin bertambahnya jumlah generasi muda dari wilayah perbatasan yang melanjutkan pendidikan mereka hingga ke jenjang universitas menambah besar tuntutan ini. Pemerintah pusat memberikan respon dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang berdimensi kewilayahan maupun sektoral untuk mendukung perwujudan pembangunan kawasan perbatasan sebagai “halaman depan” negara, yaitu sebagai pintu gerbang aktivitas sosial budaya maupun interaksi ekonomi yang saling menguntungkan dengan negara tetangga (Elisabeth, 2016).

Salah satu terobosan bagi pengelolaan kawasan perbatasan secara terintegrasi, adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Undang-Undang ini memberi mandat bagi pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di tingkat pusat dan daerah, dengan tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi serta pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Adapun pelaksana teknis pembangunan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menjadi anggota dari badan tersebut (Evaluasi dan Pengawasan Pengelolaan Perbatasan Negara, 2015). Perwujudan dari Undang-undang tersebut adalah Inpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan di sebelas Pos lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, termasuk salah satunya pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Kecamatan Jagoi-Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.

Pembangunan PLBN di Kecamatan Jagoi-Babang yang dimulai pada bulan November 2020 dan diharapkan selesai pada bulan Juli 2022, bukanlah usaha pertama pemerintah pusat dan daerah membangun PLBN. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai PT WIKA, yang merupakan perusahaan pelaksana

pembangunan PLBN, 10 tahun sebelumnya telah dimulai pembangunan PLBN di Kecamatan Jagoi-Babang. Hanya sayangnya, seperti banyak kasus pembangunan infrastruktur pemerintah yang lain, proyek pembangunan PLBN tersebut tidak terselesaikan alias “mangkrak”,

“...Sebelumnya memang sudah pernah ada proyek pembangunan PLBN, tapi kan sempat mangkrak itu, nggak dilanjut lagi itu, Bu, ada bangunan *existing*-nya. Itu udah dari tahun 2009, eh udah sekitar 3 tahunan itu nggak lanjut itu, Bu. Jadi pekerjaan strukturnya sama atapnya aja sama belum selesailah, terbengkalai gitu...”

Salah seorang partisipan yang diwawancarai, Pak Andi, menegaskan hal ini,

“...Sebenarnya PLBN ini sudah lama kami nanti-nantikan. Kalau ndak salah tuh tahun 2009 itu sudah meletakkan batu pertama. Bayangkan 2009, sekarang udah lama sekali...”

Pernyataan ini kemudian diperkuat hasil wawancara dengan Kepala Dusun Jagoi-Babang, Pak Libik,

“...Sebelumnya pembangunan yang untuk PLBN juga yang sebelumnya mangkrak, Bu. Itulah yang jadi sebenarnya jadi pembicaraan warga masyarakat di Jagoi juga karena di salah satu pihak merugikan negara. Di situlah terjadinya korupsi di antara pihak-pihak yang berwenanglah ye yang tertentu yang menggunakan anggaran tersebut bahkan miliaran rupiah habis di situ tapi tidak ada dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Jadi, pembangunan yang udah ada dibangun oleh PT WIKA ini kemarin sudah diawasi oleh masyarakat sendiri bukan diawasi dalam ikut memborong, tapi masyarakat itu ikut mengawasi memantau. Ada si segelintir warga kami yang ikut serta jadi pekerja di PLBN ini semoga nanti dapat berjalan dengan baik bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kami terutama di perbatasan ini...”

Saat diminta untuk mengklarifikasi perbedaan antara proses pembangunan PLBN di masa lalu dan proyek pembangunan PLBN di masa sekarang, kepala dusun menjelaskan,

“...Pembangunan PLBN yang sebelumnya yang mangkrak itu tidak ada konsultasi sebelumnya dengan masyarakat dibangun

tidak dibangun seperti itu saja. Pembangunan di tengah hutan siapa yang mau huninya, kan seperti itu yang ada di Jagoi Babang ini. Rumah di atas bukit justru ada orang yang bunuh diri di dalamnya jadi kan jadinya bukan manusia, tapi ya orang haluslah, makhluk halus gitu. PLBN sendiri yang berskala besar aja udah berulang kali dibangun seperti itu. Baru ini yang udah benar-bener diawasi oleh pemerintah dibangun benar-bener tujuannya memang ditujukan untuk masyarakat...”

Kepala dusun kemudian melanjutkan,

“...Karena selama inikan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah terutama di wilayah perbatasan untuk PLBN sebelumnya memang juga tidak diketahui oleh masyarakat setempat, bagaimana nantinya, tanahnya ini milik siapa, orang beli tinggal beli waktu itu, tidak disampaikan ke masyarakatnya berapa hektar. Waktu itu sempat nebak-nebak. Akhirnya, waktu pengukuran ada perbedaan luas wilayah antara dinas PU dengan Pemda Bengkayang. Ah, jadi masyarakat pun bertanya, kok bisa seperti itu ya padahal tanah kami waktu itu sekian lho yang kami jual termasuk lokasi tanahnya orang tua saya sendiri juga ada di situ, Bu, yang terkena efeknya, terkena imbas. Saya masih ingat waktu itu harganya berapa, pokoknya puluhan juta jugalah harganya. Saat ini pembangunannya memang dipantau oleh tim dari keuangan dari kementerian dari pusat, dari provinsi, kabupaten semuanya hadir. Karena biasanya dari Bengkayang maupun dari provinsi selalu hadir di perbatasan ini mengecek. Mobil plat-plat merah itu selalu hadir untuk melihat pembangunannya seperti apa. Bupati pun bahkan sempat juga hadir bahkan yang dari dirjen dari pembangunan waktu itu hadir juga ke daerah PLBN ini. Kapolda juga waktu itu hadir melalui helikopternya turun di lapangan bola Jagoi ini untuk melihat pembangunan di PLBN jadi tahun ini memang diawasi benar-bener pembangunannya...”

Penjelasan detail kepala dusun Jagoi-Babang tentang perbedaan kondisi proyek pembangunan PLBN di masa lalu dan proyek pembangunan PLBN di masa sekarang, menyorot bukan hanya perbedaan

kinerja pemerintah di masa lalu, tetapi juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan rencana pembangunan PLBN oleh pemerintah sekarang. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kerja dan transparansi proyek pembangunan PLBN, secara langsung mau pun tidak, tentu akan mempengaruhi respon dan pandangan mereka terhadap proyek-proyek pembangunan infrastruktur lainnya. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan transparansi proyek-proyek infrastruktur pemerintah, maka semakin positif pula respon serta sikap mereka terhadap pemerintah. Respon yang positif, tentu akan mempengaruhi tingkat keterlibatan mereka dan juga rasa kepemilikan terhadap proyek pembangunan PLBN yang digagas oleh pemerintah. Tidak dipungkiri, pelaksanaan pembangunan memang seharusnya bersinergi antara pemerintah dan masyarakat serta pihak swasta sebagai penghubung, dimana masyarakat sebagai pelaku utama dan pengawas, dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan atmosfer yang mendukung transparansi demi menumbuhkan rasa percaya, demi tercapainya tujuan pembangunan. Dapat disimpulkan dari wawancara, bahwa masyarakat Jagoi-Babang sudah menunggu lama untuk melihat terwujudnya PLBN yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat. Mereka juga merespon positif proyek pembangunan PLBN yang dilaksanakan sekarang.

Salah satu permasalahan masyarakat di daerah perbatasan adalah keamanan. Kurangnya pengawasan pemerintah di sepanjang garis perbatasan yang sangat panjang dan luas antara Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan Barat, yang selama ini hanya diawasi oleh pos lintas batas, pos pengawasan dan petugas yang tidak banyak serta fasilitas teknologi pengamanan perbatasan yang tertinggal, menjadi penyebab utama cukup tingginya kasus kriminal di wilayah tersebut. Kasus kriminal yang umum terjadi di daerah perbatasan antara lain, masuknya imigran gelap ke daerah Indonesia, atau dari Indonesia ke negeri tetangga secara *ilegal*, *ilegal logging*, *ilegal fishing*, *human trafficking*, serta perdagangan narkoba & psikotropika dan lain sebagainya. Salah satu yang juga menjadi fokus utama pemerintah sehubungan dengan penjagaan keamanan di wilayah perbatasan, adalah terorisme.

Kasus-kasus kriminalitas yang menjadi keprihatinan masyarakat Jagoi-Babang antara lain, penjualan kendaraan hasil curian yang terjadi antar dua negara, penyelundupan manusia, penyelundupan barang, hingga penjualan narkoba. Kepala desa Jagoi-Babang berharap masalah-

masalah kriminal tersebut akan berkurang dengan dibangunnya PLBN yang terpadu,

"...Senang dibangun karena memang yang pertama kalau dibangunnya PLBN kemungkinan apa namanya tidak resmi barang-barang yang tidak kita inginkan yang masuk ke Indonesia ini lebih terpantau lebih mudah ya, narkoba, obat terlarang, perdagangan orang. Nah, kalau misalnya PLBN ini udah jadi udah resmi kan secara otomatis lebih lebih diperketat gitu, tidak seperti sekarang ini, agak susah kita..."

Harapan kepala desa Jagoi-Babang ini dikonfirmasi oleh partisipan dari PT WIKA. Partisipan menjelaskan bahwa peningkatan keamanan wilayah perbatasan akan menjadi salah satu fokus utama dari pembangunan PLBN,

"...Nah di gedung inti itu ya ada kantor bea cukainya nanti di situ, ada pos TNI juga disitu. Jadi di bangunan intinya itu, terus ada pos pemeriksaan juga nantikan ada apa kayak x-ray ya, x-ray kendaraannya juga itu, dan mesin *scan*, mesin *scanning*..."

Hadirnya perangkat teknologi keamanan yang lebih mutakhir bersamaan dengan keberadaan aparat TNI di PLBN Jagoi-Babang tentu diharapkan akan mampu meningkatkan keamanan dan rasa aman masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan.

Sebagian masyarakat yang tinggal di perbatasan Jagoi-Babang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya-sumber daya ekonomi terbatas jumlahnya. Perkonomian masyarakat di kawasan perbatasan Jagoi sangat bertumpu pada sektor primer, yaitu pertanian, dan perkebunan. Komoditas pertanian utama berupa padi dan jagung. Padi sawah lebih mendominasi dari padi ladang dan mampu memenuhi kebutuhan beras kawasan perbatasan Jagoi Babang. Selain itu, komoditas perkebunan utama adalah sawit dan karet. Hasil perkebunan sawit dijual langsung ke pabrik CPO yang ada di Kec. Seluas untuk kemudian di jual ke pabrik di Pontianak. Sedangkan hasil perkebunan berupa karet dijual oleh petani ke tengkulak-tengkulak yang ada di masing-masing desa untuk kemudian di pasarkan ke Pontianak. Komoditas pertanian dan perkebunan yang lain adalah lada dan sayuran yang dijual langsung ke Serikin, Malaysia. Setiap harinya masyarakat mengangkut hasil sayuran menggunakan motor untuk dijual ke pasar di Serikin, Malaysia. Sayangnya, selama masa pandemi COVID-19 ini kegiatan perdagangan antar negara terpaksa harus dihentikan. Hal ini tentu saja mempengaruhi perekonomian masyarakat di Jagoi-Babang secara langsung.

Harapan mereka, dengan dibangunnya PLBN di Jagoi-Babang, bukan hanya dapat membantu masyarakat memperbaiki tingkat perekonomian, namun juga membuka lapangan pekerjaan baru, khususnya bagi para pemuda setempat yang telah berhasil mengenyam pendidikan tinggi di luar Jagoi-Babang.

Seperti yang diutarakan oleh Kepala Dusun, Pak Libik,

“...Masyarakat juga berharap agar nanti warga masyarakat yang merasakan pembangunan tersebut dan jangan lupa masyarakat jangan ditindas dan jangan dilupakan itulah harapan kami yang kami sampaikan. Warga kami dengan adanya PLBN ini berharap agar masyarakat di daerah kami ini merasakan, menikmati apa yang udah dibangun. Mereka juga bisa ikut hadir di dalam pembangunan tersebut merasakan apa yang dibuat misalnya berdagang, berjualan ikut bekerja di dalamnya walaupun hanya sekedar tukang sapu, tukang bersih-bersih jadi OB di dalamnya tuh yang penting adalah warga kami yang kerja disitu. Apalagi kalo udah diresmikannya nanti paling tidak harapan kamilah warga Jagoi khususnya tidak dilupakan ah seperti kami maunya mereka itu bekerja memiliki pekerjaan terutama banyak anak-anak yang kuliahkan jangan sampe keluar dari bangku kuliah setelah diwisuda lalu nganggur, peluang di situ ada tapi ditiadakan ah seperti itu yang kami takutkan...”

Harapan masyarakat Jagoi-Babang merupakan PR besar baik bagi pemerintah daerah mau pun pemerintah pusat. Kawasan perbatasan yang selalu tertinggal dan terisolir, dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah dan akses yang terbatas, diharapkan dapat mengalami perubahan yang lebih baik dengan dibangunnya PLBN. Bukan hanya dari sisi infrastruktur, namun terlebih pada meningkatnya kesempatan masyarakat Jagoi-Babang dalam mendapatkan akses pendidikan, perekonomian, teknologi, dan keamanan. Dukungan dan respon positif dari masyarakat Jagoi-Babang terhadap pembangunan PLBN adalah sebuah amanat rakyat yang harus ditunaikan oleh pemerintah.

Bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat perbatasan dalam proses pembangunan sarana dan prasarana PLBN Jagoi Babang serta pemanfaatannya

Dalam rangka membantu mempercepat proses pembangunan fisik PLBN Jagoi Babang dan sarana-prasarananya, tentunya diperlukan keterlibatan aktif masyarakat lokal (masyarakat perbatasan Jagoi Babang dan sekitarnya). Tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam tahap pembangunan PLBN akan memberikan dukungan terhadap lancarnya proses pembangunan fisik seperti yang telah direncanakan oleh tim *developper* dan pemerintah setempat mau pun pemerintah pusat.

Idealnya partisipasi masyarakat lokal wajib terlihat dalam berbagai bentuk baik dalam bentuk gagasan dan sumbangan pemikiran maupun sebagai pelaksana dan penikmat manfaat dari program pembangunan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Huraerah (2008) tentang berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang perlu dipertimbangkan, yaitu: (1) Partisipasi buah pikiran yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat; (2) Partisipasi tenaga yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan perbaikan pembangunan desa maupun pertolongan bagi orang lain; (3) Partisipasi harta benda yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan pembangunan berupa uang; (4) Partisipasi keterampilan dan kemahiran untuk mendorong bentuk usaha atau industri; (5) Partisipasi sosial sebagai tanda keguyuban.

Dari kelima bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh Huraerah, bentuk partisipasi masyarakat perbatasan Jagoi Babang sejauh ini yang telah dilakukan dalam proses pembangunan fisik PLBN (sarana dan prasarananya) yaitu berupa partisipasi pikiran, tenaga (sebagai pekerja), partisipasi harta benda yang dalam hal ini berupa tanah warga yang diberikan kepada pemerintah untuk bangunan PLBN dan prasarana lainnya. Bentuk partisipasi lainnya adalah memanfaatkan sarana dan prasarana di kios, pasar dan lapak yang akan dibangun di sekitar PLBN sebagai tempat untuk menjual berbagai barang dagangan. Hingga saat ini, partisipasi berupa tenaga merupakan yang paling dominan dilakukan oleh warga perbatasan dibandingkan dengan bentuk partisipasi lainnya. Sementara bentuk partisipasi sosial belum terlaksana.

Berbagai bentuk partisipasi penduduk tadi dilaksanakan secara nyata dalam tiga tahapan partisipasi yaitu pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemanfaatan. Bentuk keterlibatan penduduk perbatasan Jagoi pada tahap perencanaan pembangunan PLBN tampak pada keikutsertaan kepala desa Jagoi di rapat yang diadakan oleh pihak pemerintah dan PT WIKA (pemegang proyek pembangunan PLBN Jagoi

Babang). Tujuan rapat tersebut adalah untuk meminta ijin pihak desa untuk memperkenankan pihak perusahaan memasukkan para pekerja dari luar perbatasan, membawa alat berat, dan beberapa material bangunan dari luar Jagoi. Pada saat yang sama, kepala desa Jagoi meminta kesepakatan perwakilan PT WIKA untuk merekrut masyarakat lokal sebagai pekerja dalam proses pembangunan maupun pada tahap pemanfaatan PLBN nantinya. Selain itu, aparat desa juga meminta kepada pihak pengembang untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk menyediakan material bangunan yang diperlukan seperti pasir, semen, termasuk transportasi pengangkut dan sopirnya. Kedua belah pihak sepakat untuk menerima dan melaksanakan permintaan dari masing-masing.

Bentuk pelibatan lain pada tahap perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pihak PU adalah dengan mengundang perangkat desa untuk membicarakan pembangunan PLBN terkait pembebasan lahan warga yang akan digunakan lokasi PLBN. Sebagai tindak lanjut dari perbincangan antara pihak PU dengan aparat desa Jagoi, pemerintah berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melakukan pembelian lahan warga yang termasuk dalam lokasi PLBN.

Diperoleh keterangan tambahan dari pihak PT WIKA sebagai pelaksana proyek pembangunan PLBN Jagoi Babang bahwa mereka intens melakukan komunikasi dengan pihak bea cukai dan TNI yang bertugas di perbatasan Jagoi Babang terkait pembangunan gedung bea cukai dan pos untuk TNI beserta messnya yang akan mereka gunakan setelah PLBN beroperasi. Jadi, pada tahap perencanaan pembangunan PLBN, pihak pengembang PT WIKA juga membangun komunikasi dengan pihak terkait lainnya. Komunikasi tersebut sangat penting karena berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan pelayanan operasional PLBN kedepannya.

Di sisi lain, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari beberapa perwakilan masyarakat, sebetulnya masyarakat ingin mengajukan beberapa permohonan jika diizinkan berkomunikasi langsung dengan pihak pemerintah dan PT WIKA. Contohnya, perwakilan masyarakat pengrajin Jagoi Babang mengemukakan bahwa mereka ingin meminta pada pemerintah untuk disiapkan sebuah bangunan khusus bagi para pengrajin bidai yang dapat digunakan untuk membantu mereka dalam proses produksi dan pemasarannya.

Namun faktanya, sampai saat wawancara dilakukan, masyarakat biasa (awam) tidak diikutsertakan dalam proses perencanaan pembangunan PLBN. Partisipan juga mengatakan belum ada sosialisasi yang terjadwal dari pihak desa maupun pihak pengembang PLBN. Partisipan

mengatakan bahwa mereka hanya mendengar informasi tersebut dari aparat desa dan dari individu yang sudah mengetahui. Konsekuensinya, sebagian besar masyarakat tidak mengetahui dengan jelas peran apa yang dapat mereka lakukan dalam proses pembangunan PLBN.

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD, pihak pengembang yaitu PT WIKA menyatakan bahwa dalam perencanaan pembangunan memang tidak melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat setempat. Pertimbangannya, masyarakat tidak perlu diikutkan dalam hal perencanaan, cukup dengan mendengar informasi saja dari kepada desa atau aparat desa. Masyarakat cukup diikutsertakan dalam proses pelaksanaan sebagai pekerja bangunan dan buruh kasar lainnya.

Sebaliknya, pada tahap pembangunan fisik PLBN beserta sarana dan prasarana pendukungnya, terlihat jelas adanya keterlibatan warga setempat dalam kegiatan tersebut. Sayangnya, jumlah yang terlibat/dilibatkan, masih dianggap belum memenuhi harapan masyarakat lokal. Kuota pekerja lokal yang diikutkan bekerja di proyek PLBN masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah pekerja dari luar perbatasan Jagoi Babang. Menurut informasi yang diterima dari aparat desa, sampai tahap pembangunan sekitar 40 persen, jumlah pekerja lokal yang dilibatkan hanya ada sekitar 5 persen saja dari total pekerja yang ada. Artinya, sebagian besar pekerja didatangkan dari luar desa Jagoi. Hal ini juga dibenarkan oleh perwakilan PT WIKA yang menangani proyek pembangunan PLBN. Berdasarkan hasil wawancara, perwakilan PT WIKA menyatakan bahwa sebagian besar pekerja berasal dari luar Jagoi Babang bahkan dari luar pulau Kalimantan. Lebih lanjut, pihak PT WIKA juga menyebutkan bahwa secara kuantitatif, jumlah pekerja dari penduduk setempat yaitu hanya sekitar 40 orang.

Sebagian besar dari penduduk lokal ditempatkan pada posisi buruh bangunan dan pekerja kasar lainnya, sebagai. Sekali lagi, tukang angkut batu, pengecor semen, tukang sapu, tukang bangunan dan satpam (keamanan). Sebaliknya, posisi pengawas dan lainnya ditempati oleh pekerja dari luar daerah Jagoi Babang, khususnya dari Jawa. Kondisi ini tentu menuai protes dari warga setempat karena mereka dianggap tidak layak menduduki posisi yang lebih baik. Protes bahkan disuarakan oleh perangkat/aparat desa saat diwawancarai. Terkait hal tersebut, penduduk lokal beranggapan bahwa tidak ada keterbukaan dalam proses perekrutan pegawai imigrasi dan bea cukai. Hal inilah yang menyebabkan penduduk lokal yang mengikuti tes masuk pegawai selalu gagal atau kalah saing dengan penduduk luar Jagoi Babang. Kedepannya penduduk Jagoi Babang menginginkan

proses perekrutan/tes penerimaan pegawai imigrasi dan bea cukai harus lebih transparan. Selain itu mereka juga mengharapkan agar informasi penerimaan pegawai harus transparan dan disebarluaskan secara menyeluruh ke semua penduduk lokal di perbatasan agar mereka mengetahui dan semakin banyak yang berminat untuk mengikuti tes penerimaan pegawai.

Selain itu, pelaksana pembangunan PLBN juga melakukan konsultasi dengan kepala desa dan tokoh adat masyarakat Jagoi dalam perancangan estetika PLBN agar sesuai dengan adat Dayak dan filosofinya. Salah satu tokoh masyarakat diminta untuk mengerjakan bagian bangunan yang diperlukan adanya gambar/ukiran bermotif Dayak setempat. Tokoh adat ini sekaligus membuat tulisan yang berkaitan dengan bahasa setempat beserta filosofinya.

Selanjutnya, pelibatan aktif masyarakat yang tidak kalah penting adalah dalam pemanfaatan PLBN dan sarana-prasarana penunjang lainnya. Berdasarkan sumber-sumber tertulis (sumber di sini) dan hasil wawancara, pembangunan PLBN Jagoi Babang juga akan diikuti dengan pembangunan sarana dan prasarana penunjang lain seperti pasar, kios, kantor bea cukai, dan kantor TNI serta messnya bagi yang bertugas di perbatasan Jagoi.

Dalam hal pemanfaatan sarana-prasarana pasar dan ruko, pihak pemerintah terkait dan Imigrasi/PLBN akan memberikan kesempatan kepada semua warga perbatasan Jagoi Babang yang ingin berpartisipasi dengan memasarkan berbagai produk, termasuk hasil pertanian/perkebunan, dan kerajinan. Pihak pemerintah terkait bahkan menjanjikan akan memberikan satu ruko untuk satu KK secara gratis kepada warga lokal yang mempunyai lahan di PLBN. Ini merupakan salah satu kompensasi dari pemerintah kepada penduduk setempat selain pembayaran lahan secara tunai.

Bagi warga lainnya juga akan diberikan kesempatan untuk dapat memanfaatkan pasar, lapak, kios-kios yang akan dibangun dengan sistem sewa. Perlu diketahui, hingga saat penelitian dilakukan, belum dibahas secara rinci tentang kriteria penduduk lokal yang dapat menyewa kios/lapak, apakah berlaku untuk semua atau hanya mereka yang sudah berdagang di Pasar Serikin. Pastinya, kebijakan khusus ini akan dibahas secara lebih rinci setelah pembangunan kawasan PLBN hampir selesai atau jadi.

Meskipun hingga saat ini belum ada ketentuan detail mengenai calon penyewa pasar, kios dan lapak, namun para aparat desa beserta beberapa perwakilan masyarakat lokal (perbatasan Jagoi

Babang) telah mengajukan permohonan pada pemerintah dan pihak PLBN agar memprioritaskan penduduk lokal dibandingkan pendatang. Mereka berharap jika nantinya yang dibangun 100 ruko/lapak, maka sekitar 70 ruko diperuntukkan bagi penduduk lokal, sementara sisanya 30 ruko dapat dimanfaatkan oleh penduduk/pedagang yang berasal dari luar Jagoi Babang. Sistem pembagian kuota seperti ini dianggap lebih tepat, berkeadilan, dan menguntungkan masyarakat perbatasan Jagoi Babang.

Lewat pemanfaatan pasar, kios/lapak oleh penduduk diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap perbaikan kehidupan perekonomian penduduk lokal. Artinya, metode tersebut merupakan salah satu strategi efektif dalam pengembangan ekonomi penduduk lokal perbatasan, terlebih di masa sulit akibat pandemi Covid-19.

Setelah PLBN beroperasi atau mulai difungsikan masyarakat setempat akan dilibatkan dengan mempekerjakan mereka sebagai pegawai tetap di Kantor Imigrasi dan Bea Cukai di PLBN Jagoi Babang. Penduduk setempat akan direkrut sebagai pegawai. di ruang lingkup kerja PLBN Jagoi Babang, baik sebagai staf administrasi, teknisi, mau pun pengawas. Perekrutan penduduk lokal sebagai buruh juga tetap dilakukan seperti sebagai satpam (keamanan), *cleaning service*, porter, pesuruh dan lainnya. Ini karena sebagian besar penduduk lokal masih berpendidikan relatif rendah. Meskipun demikian mereka tetap akan diberdayakan secara profesional dibidangnya sehingga berkontribusi dalam pelayanan yang berkualitas di PLBN Jagoi Babang.

Penduduk lokal, baik yang direkrut sebagai pegawai mau pun pekerja kasar, keduanya akan diperlakukan sama, yaitu mereka wajib menjalani tes dan pelatihan kerja sebelum mulai bekerja di posisi masing-masing. Hal ini penting dalam upaya menciptakan kualitas dan profesionalitas pekerja di PLBN. Kualitas pekerja yang tinggi akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan di imigrasi dan bea cukai. Diharapkan ini dapat menjadi motivasi penduduk setempat dan penduduk luar untuk selalu memilih jalur resmi di PLBN Jagoi Babang dalam melakukan kegiatan lintas batas kedua negara.

Rencana pemberian pelatihan kepada warga dibenarkan oleh aparat desa Jagoi. Partisipan menjelaskan bahwa pihak pemerintah dan PLBN nantinya memang akan melakukan berbagai bentuk pelatihan kepada masyarakat Jagoi Babang sesuai dengan jenis pekerjaan yang diperlukan dan posisi yang akan ditempati oleh calon pegawai. Mereka yang dinyatakan layak dan dianggap sesuai dengan

kriteria yang diperlukan, selanjutnya akan ditempatkan pada bagian yang telah ditentukan berdasarkan *skill* atau ketrampilan yang telah dimiliki. Berbagai upaya yang telah dilakukan maupun direncanakan oleh pemerintah diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kualitas hidup penduduk perbatasan secara ekonomi maupun sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan beberapa temuan penting yaitu:

Pada umumnya, masyarakat Jagoi-Babang sudah menunggu lama untuk melihat terwujudnya PLBN yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat. Mereka juga merespon positif proyek pembangunan PLBN yang dilaksanakan sekarang. Harapan mereka, dengan dibangunnya PLBN di Jagoi-Babang, bukan hanya dapat membantu masyarakat memperbaiki tingkat perekonomian, namun juga membuka lapangan pekerjaan baru, khususnya bagi para pemuda setempat yang telah berhasil mengenyam pendidikan tinggi di luar Jagoi-Babang.

Hasil temuan kedua yaitu secara general dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat lokal (Jagoi Babang) telah dan sedang dilibatkan dalam proses perencanaan dan tahap pelaksanaan pembangunan fisik PLBN, hanya saja kuota atau jumlahnya masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan penduduk dari luar perbatasan Jagoi Babang. Selain itu, sebagian besar dari mereka hanya sebagai pekerja kasar seperti pengangkut batu, pengecor semen, tukang bangunan, tukang bersih/ tukang sapu dan satpam (*security*). Sedangkan dalam hal rencana pemanfaatan PLBN setelah beroperasi nantinya pihak Imigrasi dan Bea Cukai di PLBN Jagoi Babang berjanji akan tetap mengikutsertakan penduduk lokal sebagai tenaga kerja baik sebagai pegawai bagian Imigrasi dan petugas Bea Cukai di PLBN, sebagai buruh kasar atau pekerja *non skilled* dan juga sebagai pedagang yang akan memanfaatkan bangunan pasar, ruko, kios maupun lapak-lapak di sekitar PLBN untuk berjualan berbagai hasil kebun/pertanian dan hasil karya pengrajin bidai, dan lainnya.

Berdasarkan hasil temuan penelitian terkait tanggapan, kesiapan dan bentuk-bentuk pelibatan masyarakat lokal sejauh ini dalam proses pembangunan PLBN, maka tim peneliti menawarkan beberapa saran/rekomendasi yang selanjutnya dirumuskan dalam sebuah model/strategi penguatan yang efektif untuk mendorong pelibatan aktif masyarakat pada tahap proses pelaksanaan

pembangunan dan pada tahap pemanfaatan sarana dan prasarana PLBN Jagoi Babang.

Adapun saran/rekomendasi yang ditawarkan yaitu: Perlu pelibatan aktif masyarakat lokal (perbatasan) lebih banyak lagi dalam proses pembangunan PLBN sebagai pekerja karena di masa pandemi Covid-19 jumlah penduduk perbatasan Jagoi Babang dan sekitarnya banyak yang kehilangan pekerjaan; Diperlukan adanya komunikasi yang lebih intens lagi dan transparan dalam perekrutan pekerja PLBN oleh pihak PT WIKA selaku pengembang proyek PLBN dengan aparat pemerintah desa bersama masyarakat lokal; Diperlukan adanya komitmen pemerintah daerah untuk melibatkan secara aktif sumber daya manusia penduduk perbatasan Jagoi Babang untuk juga nantinya diprioritaskan sebagai pekerja di PLBN sebagai pegawai Imigrasi, petugas Bea Cukai, operator komputer, teknisi dan lain-lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki mereka; Sebelum memperkerjakan penduduk lokal di PLBN, pihak pemerintah terkait sebaiknya memberikan pelatihan kerja terlebih dahulu kepada masyarakat yang akan dipekerjakan; Pemerintah dan pihak PLBN juga wajib memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan sarana dan prasana PLBN seperti berjualan barang, membuka rumah makan, toko dan usaha kreatif lainnya di sekitar PLBN.

DAFTAR PUSTAKA

- Antaraneews. (2018). Pamtas menangkap dua warga Malaysia membawa sabu-sabu. *Antaraneews*. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/768472/pamtas-menangkap-dua-warga-malaysia-membawa-sabu-sabu>.
- Antonius Apong. (2020). Kick off meeting kegiatan pengembangan pos lintas batas negara (PLBN) terpadu Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. *Diskominfokab.bengkayang*. Retrieved from <https://bengkayangkab.go.id/kick-off-meeting-kegiatan-pengembangan-pos-lintas-batas-negara-plbn-terpadu-jagoi-babang-kabupaten-bengkayang/>.
- Arnstein, Sherry R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Planning Association*.
- Dewi, Fandeli & Baiquni. (2013). Pengembangan Desa Wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih. *Jurnal Kawistara*, Vol.3.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat. (2020). PLBN terpadu Jagoi Babang berkonsep green building. *Ciptakarya*. Retrieved from

- <http://ciptakarya.pu.go.id/balai/kalimantanbarat/berita/detail/BPB/11521/PLBN-Terpadu-Jagoi-Babang-Berkonsep-Green-Buildin>
- Dita Angga Rusiana. (29 September 2020). BNPP sebut ada 29 titik tak resmi di lintas batas Indonesia-Malaysia. *Sindonews*. Retrieved from <https://nasional.sindonews.com/read/180076/14/bnpp-sebut-ada-29-titik-tak-resmi-di-lintas-batas-indonesia-malaysia-1601363363>.
- Dwiningrum, S.I.A. (2011). *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gabriela, S. (2019). Kerja sama Indonesia-Interpol dalam menangani isu penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan Indonesia. *Intermestic: Journal of International Studies*, 3(2), 147-172. Doi: 10.24198/intermestic.v3n2.4
- Gafar, Y. (2012). Penanggulangan peredaran narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia)-Sarawak (Malaysia) (Studi terhadap Peranan Badan Narkotika Nasional). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(2), 1-20.
- Huraerah, Abu. (2008). *Pengorganisasian & pengembangan masyarakat : Model dan strategi pembangunan berbasis kerakyatan*. Bandung : Humaniora.
- Isbandi Rukminto Adi. (2007). *Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: 14 dari pemikiran menuju penerapan*. Depok : FISIP UI Press.
- Kalbar.antaranews.com. (2021). Wakil Bupati Bengkayang Mendukung Penyelesaian Pekerjaan PLBN Jagoi Babang. *Kalbar Antaranews*. Retrieved from <https://kalbar.siberindo.co/10/03/2021/wakil-bupati-bengkayang-mendukung-penyelesaian-pekerjaan-plbn-jagoi-babang/>.
- Niko, N. (2017). Fenomena trafficking in person di wilayah perbatasan kalimantan barat. *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 4(1), 32-45.
- Pontianak Post. (2019). Sita dua miliar, mobil mewah dan motor sport dari tersangka narkoba. *Pontianak Post*. Retrieved from <https://pontianakpost.co.id/polda-sita-uang-miliaran-danmobil/>.
- Rri.co.id. (2019). Satgas pamtas yonmek 643 amankan warga Jagou babang bawa sabu. *RRI*. Retrieved from <https://rri.co.id/pontianak/1297-sigap-tni-polri/716450/satgas-pamtas-yonmek-643-amankan-warga-jagoi-babang-bawa-sabu>.
- Suara Pamred. (2019). Penyelundup jebol perbatasan. *Suara Pamred*. Retrieved from <https://www.suarapemredkalbar.com/berita/bengkayang/2019/08/22/penyelundupjebol-perbatasan>.
- Suarapempred Kalbar. (2017). Perbatasan Malaysia-Jagoi Babang masih rawan penyelundupan narkoba. *Suarapempred kalbar*. Retrieved from <https://www.suarapemredkalbar.com/read/bengkayang/10022017/perbatasa-malaysia-jagoi-babang-masih-rawan-penyelundupan-narkoba>.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumampouw, Monique. (2004). *Perencanaan darat-laut yang terintegrasi dengan menggunakan informasi spasial yang partisipatif*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Sumaryadi, I Nyoman. (2010). *Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Wazir, Ws. (1999). *Panduan penguatan manajemen lembaga swadaya masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa.
- Wikipedia. (2020). Pos lintas batas negara di Indonesia. *Wikipedia*. Retrieved from https://id.wikipedia.org/wiki/Pos_lintas_batas_negara_di_Indonesia.